

Partisipasi Kewargaan Pemuda dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kualitatif tentang Praktik Kewargaan Lingkungan di Jakarta

Raditya Pratama¹

Universitas Negeri Jakarta

Korespondensi Email : radityapratama@unj.ac.id

Abstract

This article analyzes youth citizenship practices in urban waste management in Jakarta. The study departs from the argument that citizenship in contemporary cities is not limited to formal political participation, but is also expressed through collective responsibility, environmental action, and collaboration between citizens and local institutions. Using a descriptive qualitative approach, the research examines how urban youth interpret environmental issues, organize civic initiatives, and engage in waste-related community activities in selected neighborhoods in Jakarta. The study involved 15 informants consisting of youth community activists, neighborhood volunteers, local environmental coordinators, and residents participating in waste reduction programs. Data were collected through interviews, observation, and document review. Based on the findings, the article identifies three major patterns. First, youth citizenship in waste management emerges through issue awareness and the willingness to transform everyday environmental problems into collective civic concerns. Second, civic participation becomes more effective when youth initiatives are connected with neighborhood networks, local leadership, and practical programs such as waste sorting, education campaigns, and recycling activities. Third, the sustainability of environmental citizenship remains constrained by weak continuity, low public discipline, and uneven institutional support. In this context, the article argues that environmental citizenship among urban youth represents an important form of democratic participation rooted in everyday life. Accordingly, strengthening citizenship in urban environmental governance requires civic education, collaborative support systems, and more responsive local institutions.

Keywords: *citizenship; youth participation; environmental citizenship; waste management; Jakarta*

Abstrak

Artikel ini menganalisis praktik kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah perkotaan di Jakarta. Kajian ini berangkat dari argumen bahwa kewargaan di kota-kota kontemporer tidak terbatas pada partisipasi politik formal, tetapi juga diekspresikan melalui tanggung jawab kolektif, tindakan lingkungan, dan kolaborasi antara warga dengan institusi lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana pemuda perkotaan memaknai persoalan lingkungan, mengorganisasi inisiatif kewargaan, dan terlibat dalam aktivitas komunitas yang berkaitan dengan pengurangan sampah di beberapa wilayah Jakarta. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang terdiri atas aktivis komunitas pemuda, relawan lingkungan tingkat warga, koordinator kegiatan lokal, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam

program pengurangan sampah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Berdasarkan temuan penelitian, artikel ini mengidentifikasi tiga pola utama. Pertama, kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah muncul melalui kesadaran isu dan kemauan mengubah persoalan lingkungan sehari-hari menjadi kepedulian sipil bersama. Kedua, partisipasi kewargaan menjadi lebih efektif ketika inisiatif pemuda terhubung dengan jejaring warga, kepemimpinan lokal, dan program praktis seperti pemilahan sampah, kampanye edukasi, dan kegiatan daur ulang. Ketiga, keberlanjutan kewargaan lingkungan masih dibatasi oleh lemahnya kontinuitas, rendahnya disiplin publik, dan dukungan kelembagaan yang belum merata. Dalam konteks ini, artikel menegaskan bahwa kewargaan lingkungan di kalangan pemuda perkotaan merupakan bentuk penting partisipasi demokratis yang berakar pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penguatan kewargaan dalam tata kelola lingkungan perkotaan memerlukan pendidikan kewargaan, sistem dukungan kolaboratif, dan institusi lokal yang lebih responsif.

Kata kunci: kewargaan; partisipasi pemuda; kewargaan lingkungan; pengelolaan sampah; Jakarta

Pendahuluan

Kewargaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai anggota negara, tetapi juga menyangkut praktik partisipasi, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan dalam kehidupan publik (Marshall, 1950). Dalam perkembangan masyarakat urban kontemporer, makna kewargaan semakin meluas karena warga tidak lagi hanya dinilai dari keikutsertaannya dalam pemilu, organisasi formal, atau forum politik resmi, melainkan juga dari keterlibatan mereka dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari yang menyangkut kepentingan bersama. Based on perkembangan ini, kewargaan dapat dipahami sebagai praktik hidup bersama yang mewujud dalam tindakan konkret, kepedulian sosial, dan kontribusi terhadap ruang publik (Isin & Nielsen, 2008). Salah satu arena penting bagi praktik tersebut adalah persoalan lingkungan perkotaan, khususnya pengelolaan sampah.

Sampah perkotaan merupakan isu publik yang sangat dekat dengan kehidupan warga, terutama di kota besar seperti Jakarta. Pertumbuhan penduduk, pola konsumsi yang meningkat, keterbatasan lahan, serta kompleksitas tata kelola perkotaan menjadikan persoalan sampah tidak sekadar persoalan teknis kebersihan, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan kewargaan. Dalam konteks ini, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah atau layanan teknis semata. Through keterlibatan warga, terutama generasi muda, persoalan tersebut dapat diubah menjadi ruang pembelajaran demokrasi, kolaborasi sosial, dan pembentukan tanggung jawab kolektif. Dengan kata lain, pengelolaan sampah menyediakan arena konkret untuk melihat bagaimana warga mempraktikkan nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemuda memiliki posisi yang penting dalam praktik kewargaan lingkungan. Sebagai kelompok yang relatif lebih terbuka terhadap inovasi sosial, teknologi komunikasi, dan jejaring komunitas, pemuda sering kali menjadi penggerak kampanye,

edukasi, dan aksi lingkungan di tingkat lokal. Mereka bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga agen yang dapat membentuk norma baru dalam masyarakat, termasuk dalam kebiasaan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, dan mengedukasi warga sekitar. Dalam kajian kewargaan, partisipasi pemuda dianggap penting karena mencerminkan proses pembelajaran demokrasi, tanggung jawab sosial, dan agency dalam ruang publik (Checkoway, 2011; Ekman & Amnå, 2012). Accordingly, keterlibatan pemuda dalam isu lingkungan dapat dibaca sebagai bentuk kewargaan aktif yang berbasis pada problem sosial nyata.

Jakarta sebagai kota metropolitan menyediakan konteks yang sangat relevan untuk mengkaji isu ini. Kota ini menghadapi tantangan lingkungan yang terus berkembang, termasuk volume sampah rumah tangga yang besar, ketimpangan kualitas layanan publik antarwilayah, kebiasaan buang sampah yang belum disiplin, serta kebutuhan koordinasi antara pemerintah, komunitas, dan warga. On the other hand, Jakarta juga memiliki beragam komunitas pemuda, bank sampah, gerakan lingkungan warga, dan inisiatif sosial yang memperlihatkan adanya energi kewargaan di tingkat lokal. In this context, praktik kewargaan tidak selalu muncul dalam bentuk gerakan besar atau organisasi formal, tetapi justru dalam aktivitas sehari-hari seperti kerja bakti, sosialisasi pemilahan sampah, kampanye digital lingkungan, atau pengelolaan bank sampah skala komunitas.

Kajian tentang kewargaan lingkungan berkembang dari kesadaran bahwa relasi antara warga dan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral, sosial, dan politik dalam kehidupan bersama. Dobson (2003) menjelaskan bahwa kewargaan lingkungan menekankan tanggung jawab warga terhadap keberlanjutan, baik dalam lingkup lokal maupun global. Sementara itu, Barry (2006) menekankan bahwa praktik kewargaan lingkungan melibatkan perubahan perilaku, komitmen etis, dan partisipasi dalam upaya kolektif menjaga lingkungan. Dengan demikian, kewargaan lingkungan bukan sekadar pengetahuan tentang isu ekologi, tetapi juga tindakan dan sikap yang menunjukkan kesediaan warga untuk turut memikul beban penyelesaian masalah bersama. Based on perspektif ini, pengelolaan sampah menjadi salah satu bentuk konkret tempat kewargaan lingkungan dipraktikkan.

Dalam konteks pendidikan kewargaan dan studi citizenship, persoalan lingkungan semakin penting karena menunjukkan bahwa kewargaan masa kini bersifat lintas isu dan berakar pada kehidupan sehari-hari. Kewargaan tidak selalu hadir dalam arena konstitusional yang formal, melainkan dapat diwujudkan melalui tindakan warga dalam menjaga lingkungan, membangun solidaritas, dan berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas hidup bersama (Biesta, 2011). Thus, tindakan sederhana seperti mengajak warga memilah sampah, membangun kompos kolektif, atau mengadakan edukasi lingkungan bagi anak-anak dapat memiliki makna kewargaan yang signifikan. Praktik tersebut mencerminkan nilai tanggung jawab, partisipasi, kepedulian, dan kesediaan untuk bertindak demi kepentingan umum.

Meskipun demikian, keterlibatan pemuda dalam pengelolaan sampah juga menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua komunitas memiliki keberlanjutan program yang baik. Banyak inisiatif lingkungan berjalan aktif hanya pada fase awal, tetapi kemudian melemah karena kelelahan relawan, keterbatasan dukungan institusional, atau rendahnya partisipasi warga. Selain itu, budaya praktis dalam membuang sampah, kebiasaan konsumsi sekali pakai, serta persepsi bahwa isu sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah turut membatasi berkembangnya kewargaan lingkungan. On the other hand, ketika pemuda mampu membangun jejaring yang kuat dengan RT/RW, sekolah, kelompok ibu rumah tangga, atau aparat setempat, maka program lingkungan cenderung lebih bertahan dan berdampak luas. Dalam hal ini, keberhasilan kewargaan lingkungan sangat bergantung pada kualitas relasi sosial dan dukungan kelembagaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam isu lingkungan akan lebih efektif apabila ditopang oleh rasa memiliki terhadap lingkungan, dukungan komunitas, dan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan tindakan (Schlosberg & Craven, 2019; Melo-Escrihuela, 2008). Dalam konteks pemuda, partisipasi tersebut juga berkaitan dengan pengalaman belajar sosial, pembentukan identitas kolektif, dan peluang untuk membangun kepemimpinan sipil. Namun, masih relatif sedikit pembahasan yang secara khusus melihat pengelolaan sampah perkotaan sebagai arena praktik kewargaan pemuda di kota besar Indonesia. Padahal, persoalan ini penting untuk memperluas pemahaman tentang citizenship dari dimensi normatif menuju dimensi praksis yang kontekstual.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana pemuda di Jakarta mempraktikkan kewargaan dalam pengelolaan sampah perkotaan, faktor apa yang memperkuat partisipasi tersebut, dan kendala apa yang membatasi keberlanjutannya? Berdasarkan pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal. Pertama, bagaimana kesadaran isu lingkungan mendorong partisipasi kewargaan pemuda. Kedua, bagaimana inisiatif pemuda terhubung dengan jejaring sosial dan program komunitas di tingkat lokal. Ketiga, bagaimana tantangan kelembagaan dan budaya memengaruhi keberlanjutan kewargaan lingkungan. In this context, artikel ini berkontribusi pada kajian *Journal of Citizenship* dengan menunjukkan bahwa kewargaan pemuda di kota metropolitan dapat dipahami melalui praktik lingkungan sehari-hari yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah perkotaan di Jakarta. Lokasi penelitian dipilih pada beberapa lingkungan permukiman dan komunitas warga di wilayah Jakarta yang memiliki aktivitas pengurangan sampah, edukasi lingkungan, atau keterlibatan pemuda dalam program kebersihan berbasis komunitas. Sumber data

penelitian terdiri atas 15 informan yang meliputi penggerak komunitas pemuda, relawan lingkungan, koordinator bank sampah, pengurus lingkungan tingkat warga, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap aktivitas komunitas dan praktik pengelolaan sampah di lapangan, serta telaah dokumen berupa materi kampanye, catatan kegiatan komunitas, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola mengenai kesadaran kewargaan, bentuk partisipasi, jejaring kolaborasi, dan hambatan keberlanjutan program (Miles et al., 2014). Through proses ini, data primer dan sekunder dibandingkan untuk melihat keterkaitan antara narasi partisipasi dengan praktik nyata di lapangan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengecekan silang antar-informan agar interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dan kredibel (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2014).

Hasil dan Diskusi

1. Kesadaran Isu Lingkungan sebagai Titik Awal Praktik Kewargaan

Temuan pertama menunjukkan bahwa praktik kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah di Jakarta berawal dari tumbuhnya kesadaran bahwa sampah bukan sekadar urusan rumah tangga atau petugas kebersihan, melainkan persoalan publik yang memengaruhi kualitas hidup bersama. Banyak informan menjelaskan bahwa pengalaman melihat tumpukan sampah di saluran air, lingkungan yang kotor, atau kebiasaan buang sampah sembarangan mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi komunitas. Based on pengalaman tersebut, pemuda mulai memaknai isu sampah sebagai isu kewargaan karena dampaknya dirasakan oleh semua warga, mulai dari gangguan kesehatan, banjir, hingga menurunnya kenyamanan ruang tinggal. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik kewargaan sering kali lahir dari persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan semata dari diskursus politik formal (Isin & Nielsen, 2008).

Dalam konteks ini, kesadaran lingkungan berkembang menjadi kesadaran sipil. Pemuda yang semula hanya merasa terganggu oleh kondisi lingkungan kemudian melihat perlunya tindakan bersama agar persoalan tidak terus berulang. Mereka mulai mengajak teman sebaya, berdiskusi dengan pengurus lingkungan, atau ikut kegiatan lokal yang bertujuan memperbaiki kebersihan wilayah. Through proses tersebut, kepedulian personal berubah menjadi tindakan kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kewargaan aktif tumbuh ketika individu melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas politik dan sosial yang memiliki tanggung jawab atas ruang hidup bersama (Biesta, 2011).

Kesadaran ini juga diperkuat oleh pengalaman sosial yang bersifat langsung. Informan menegaskan bahwa kegiatan bersih lingkungan, pemilahan sampah, dan kunjungan ke bank sampah membuat mereka lebih memahami kaitan antara perilaku

warga dengan dampak ekologis dan sosial. In this context, pembelajaran kewargaan tidak hanya berlangsung di ruang kelas atau forum resmi, tetapi juga dalam praktik lapangan yang memperlihatkan hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan kolektif. Accordingly, isu lingkungan menjadi media pembelajaran kewargaan yang konkret dan kontekstual.

Namun, kesadaran tersebut tidak muncul secara otomatis pada semua pemuda. Sebagian informan menyatakan bahwa banyak anak muda masih melihat isu sampah sebagai urusan teknis pemerintah atau sekadar kewajiban petugas kebersihan. On the other hand, mereka yang pernah terlibat dalam kegiatan komunitas cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya peran warga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentukan kewargaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman partisipatif. Dengan demikian, kesadaran kewargaan tidak cukup dibangun melalui himbauan normatif, tetapi perlu dibentuk melalui keterlibatan langsung, dialog komunitas, dan pengalaman kolektif yang berulang.

Temuan ini mempertegas bahwa kewargaan lingkungan merupakan bentuk kewargaan yang berbasis pada pengalaman keseharian. Ketika pemuda melihat dampak nyata dari sampah di lingkungan mereka, maka isu tersebut menjadi lebih mudah diterjemahkan ke dalam bahasa tanggung jawab sosial. Based on hal itu, keterlibatan pemuda dalam pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai bentuk citizenship yang tumbuh dari kedekatan dengan masalah publik dan dari kesadaran bahwa kualitas kota tidak dapat dibebankan pada negara semata (Dobson, 2003; Barry, 2006).

2. Jejaring Komunitas dan Program Praktis sebagai Penguat Partisipasi

Temuan kedua menunjukkan bahwa partisipasi kewargaan pemuda menjadi lebih kuat ketika terhubung dengan jejaring komunitas dan program yang bersifat praktis. Banyak informan menegaskan bahwa keterlibatan mereka tidak berkembang melalui aksi individu yang berdiri sendiri, tetapi melalui kerja bersama dengan komunitas lingkungan, pengurus RT/RW, kelompok warga, sekolah, dan bank sampah. Through jejaring ini, pemuda memperoleh ruang untuk berkontribusi, belajar, dan melihat bahwa tindakan kecil dapat menjadi bagian dari perubahan bersama. Hal ini sejalan dengan kajian partisipasi warga yang menekankan pentingnya modal sosial, jaringan lokal, dan dukungan komunitas dalam memperkuat tindakan kolektif (Putnam, 2000).

Dalam praktiknya, bentuk partisipasi pemuda di Jakarta cukup beragam. Sebagian terlibat dalam edukasi pemilahan sampah di tingkat lingkungan, sebagian lain membantu pengumpulan sampah anorganik untuk didaur ulang, dan ada pula yang membuat kampanye kreatif melalui media sosial atau kegiatan tatap muka. In this context, program yang sederhana justru memiliki pengaruh yang besar karena mudah diikuti warga dan memberi hasil yang langsung terlihat. Kegiatan seperti kerja bakti rutin, pelatihan kompos, lomba kebersihan lingkungan, atau pendampingan bank sampah menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat identitas warga sebagai bagian dari komunitas yang peduli.

Based on temuan lapangan, efektivitas partisipasi juga sangat dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan lokal yang membuka ruang bagi pemuda. Ketika pengurus lingkungan, tokoh masyarakat, atau koordinator program memberi kepercayaan kepada pemuda untuk merancang dan menjalankan kegiatan, maka keterlibatan mereka menjadi lebih berkelanjutan. On the other hand, ketika pemuda hanya diposisikan sebagai tenaga tambahan tanpa ruang inisiatif, partisipasi cenderung melemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewargaan tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada struktur kesempatan untuk berpartisipasi (Ekman & Amnå, 2012).

Jejaring komunitas juga membantu menghubungkan tujuan lingkungan dengan manfaat sosial yang lebih luas. Informan menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah sering kali tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menumbuhkan solidaritas antarwarga, mempertemukan generasi muda dengan kelompok ibu rumah tangga, dan memperkuat hubungan antara warga dengan pengurus lokal. Accordingly, pengelolaan sampah berfungsi sebagai medium penguatan koehsi sosial. Dalam kajian citizenship, hal ini penting karena partisipasi demokratis tidak hanya menghasilkan solusi praktis, tetapi juga membangun relasi sosial yang menopang kehidupan bersama (Marshall, 1950).

Berikut ini ringkasan temuan utama penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Praktik Kewargaan Pemuda dalam Pengelolaan Sampah di Jakarta

Dimensi	Temuan Lapangan	Makna Kewargaan
Kesadaran isu	Pemuda melihat sampah sebagai persoalan bersama	Tumbuhnya tanggung jawab sipil
Bentuk partisipasi	Edukasi, kerja bakti, bank sampah, kampanye lingkungan	Kewargaan diwujudkan dalam tindakan nyata
Jejaring kolaborasi	Keterlibatan RT/RW, komunitas, warga, dan relawan	Partisipasi diperkuat oleh kerja kolektif
Manfaat sosial	Lingkungan lebih bersih, solidaritas meningkat, warga lebih aktif	Citizenship membangun koehsi sosial
Hambatan utama	Partisipasi tidak stabil, disiplin warga rendah, dukungan belum merata	Kewargaan membutuhkan penguatan institusional

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi pemuda tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang mendukungnya. Based on data wawancara, pemuda yang terlibat secara konsisten umumnya berada dalam lingkungan yang memiliki budaya gotong royong, tokoh penggerak, dan program yang jelas. Thus, kewargaan lingkungan tidak tumbuh dalam ruang kosong, tetapi dalam relasi sosial yang memungkinkan tindakan warga menjadi bermakna dan berkelanjutan.

Temuan ini menegaskan bahwa kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah bersifat relational dan practical. Artinya, kewargaan tidak cukup dilihat sebagai sikap peduli, tetapi sebagai kemampuan untuk bekerja bersama, mengorganisasi tindakan,

dan menjaga keberlanjutan program komunitas. In this context, partisipasi pemuda menjadi wujud dari civic engagement yang menempatkan kepentingan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis sehari-hari (Checkoway, 2011).

3. Hambatan Keberlanjutan: Disiplin Publik, Kontinuitas, dan Dukungan Kelembagaan

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa meskipun partisipasi pemuda cukup aktif, keberlanjutan kewargaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang paling sering muncul adalah rendahnya disiplin sebagian warga dalam membuang dan memilah sampah. Informan menyatakan bahwa setelah kegiatan sosialisasi atau aksi komunitas selesai, kebiasaan lama sering kali kembali muncul. Warga masih mencampur sampah, membuang sampah di waktu yang tidak sesuai, atau menganggap pengelolaan sampah sebagai urusan orang lain. Based on kondisi ini, dapat dipahami bahwa perubahan perilaku publik memerlukan proses yang panjang dan tidak dapat dicapai hanya melalui satu atau dua kegiatan.

Kendala lain adalah lemahnya kontinuitas partisipasi. Banyak program awalnya berjalan dengan semangat tinggi karena didorong oleh beberapa relawan aktif, tetapi kemudian menurun ketika penggerak utama sibuk, pindah tempat tinggal, atau mengalami kelelahan. On the other hand, komunitas yang memiliki pembagian tugas yang jelas dan dukungan sosial yang lebih luas cenderung lebih bertahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kewargaan lingkungan memerlukan kelembagaan komunitas yang lebih kokoh, bukan hanya bergantung pada figur penggerak. Dalam kajian partisipasi, keberlanjutan memang sangat ditentukan oleh institusionalisasi peran, rutinitas kegiatan, dan rasa memiliki bersama terhadap program (Putnam, 2000).

Dukungan kelembagaan yang belum merata juga menjadi persoalan penting. Sebagian informan merasa terbantu oleh adanya fasilitasi lokal, akses terhadap sarana sederhana, atau dukungan komunikasi dari aparat lingkungan. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa inisiatif warga sering berjalan sendiri tanpa penguatan yang memadai. In this context, keterbatasan fasilitas, kurangnya insentif, dan minimnya tindak lanjut dari pihak terkait dapat melemahkan motivasi partisipasi. Accordingly, kewargaan aktif membutuhkan institusi yang tidak hanya membuat aturan, tetapi juga menyediakan ekosistem dukungan bagi warga yang ingin terlibat (Biesta, 2011).

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya ketegangan antara semangat sukarela dan kebutuhan akan hasil yang cepat. Pemuda sering memiliki kreativitas dan energi, tetapi perubahan lingkungan membutuhkan waktu, kesabaran, dan proses edukasi yang berulang. Ketika hasil tidak segera terlihat, sebagian partisipan merasa upayanya kurang dihargai. On the other hand, mereka yang memiliki pengalaman komunitas lebih panjang cenderung memahami bahwa penguatan kewargaan adalah proses bertahap. Dengan demikian, tantangan dalam program sampah bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut ekspektasi, komitmen, dan ketahanan sosial para pelaku.

Berdasarkan keseluruhan temuan, artikel ini mengidentifikasi empat poin utama. Pertama, kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah tumbuh dari kesadaran bahwa

persoalan lingkungan merupakan persoalan bersama. Kedua, partisipasi menjadi lebih efektif ketika ditopang oleh jejaring komunitas, kepemimpinan lokal, dan program yang praktis. Ketiga, pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga memperkuat solidaritas dan hubungan antarwarga. Keempat, keberlanjutan program masih dibatasi oleh rendahnya disiplin publik, lemahnya kontinuitas relawan, dan dukungan kelembagaan yang belum konsisten. Thus, praktik kewargaan lingkungan di Jakarta memperlihatkan bahwa partisipasi warga memiliki potensi besar, tetapi memerlukan penguatan struktural dan kultural agar tetap bertahan.

Dalam konteks kajian *Journal of Citizenship*, temuan ini memperluas pemahaman bahwa kewargaan tidak hanya diwujudkan dalam hubungan warga dengan negara secara formal, tetapi juga dalam tindakan kolektif warga untuk mengelola persoalan bersama di tingkat lokal. Sampah, dalam hal ini, menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana pemuda membangun tanggung jawab sosial, kerja sama, dan komitmen terhadap kualitas hidup kota. Accordingly, kewargaan lingkungan dapat dibaca sebagai bentuk partisipasi demokratis yang konkret, membumi, dan relevan dengan tantangan kota-kota besar saat ini.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik kewargaan pemuda dalam pengelolaan sampah perkotaan di Jakarta menunjukkan bahwa citizenship dapat tumbuh secara kuat melalui persoalan lingkungan sehari-hari. Based on temuan penelitian, pemuda tidak hanya bertindak sebagai peserta kegiatan kebersihan, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran, penghubung antarwarga, dan pelaku aksi kolektif yang memberi makna sosial pada pengelolaan sampah. Partisipasi mereka menjadi lebih bermakna ketika didukung oleh jejaring komunitas, kepemimpinan lokal, dan program praktis yang memungkinkan warga terlibat secara langsung. Dalam konteks ini, artikel ini menegaskan bahwa kewargaan lingkungan merupakan bentuk penting dari kewargaan aktif yang memadukan tanggung jawab, solidaritas, dan tindakan nyata untuk kepentingan umum.

Accordingly, kontribusi artikel ini terletak pada penegasan bahwa isu sampah dapat dibaca sebagai arena pendidikan kewargaan dan praktik demokrasi di tingkat lokal. Ke depan, penguatan partisipasi pemuda dalam pengelolaan sampah di Jakarta memerlukan pendidikan kewargaan yang lebih kontekstual, dukungan institusional yang lebih responsif, ruang kolaborasi yang berkelanjutan antara komunitas dan aparaturnya lokal, serta strategi pembiasaan publik yang mendorong disiplin lingkungan. Dengan demikian, kewargaan pemuda tidak berhenti pada kesadaran simbolik, tetapi berkembang menjadi kapasitas kolektif yang berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Referensi

Barry, J. (2006). Resistance is fertile: From environmental to sustainability citizenship. In A. Dobson & D. Bell (Eds.), *Environmental citizenship* (pp. 21–48). MIT Press.

- Biesta, G. (2011). *Learning democracy in school and society: Education, lifelong learning, and the politics of citizenship*. Sense Publishers.
- Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review*, 33(2), 340–345.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. Oxford University Press.
- Ekman, J., & Amnå, E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. *Human Affairs*, 22(3), 283–300.
- Isin, E. F., & Nielsen, G. M. (2008). *Acts of citizenship*. Zed Books.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Press.
- Melo-Escribuela, C. (2008). Promoting ecological citizenship: Rights, duties and political agency. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 7(2), 113–134.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Schlosberg, D., & Craven, L. (2019). Sustainable materialism: Environmental movements and the politics of everyday life. *Environmental Politics*, 28(7), 1125–1144